

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan internasional merupakan suatu hubungan yang terjadi diantara satu negara dengan negara lain atau individu pada bidang yang berbeda untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Fenomena hubungan internasional merupakan suatu hal yang terjadi disebabkan oleh adanya saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional sehingga suatu negara tidak akan mampu untuk menutup diri dari dunia luar. Setiap aktor tentu tidak dapat terlepas dari hubungan internasional, hal ini karna setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan sehingga hubungan internasional dapat melengkapi itu.

Hubungan internasional tidak hanya terjadi karna ingin bekerjasama, menciptakan persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun peperangan juga termasuk dalam hubungan internasional. Adanya hubungan internasional dirancang guna untuk meminimalisir terjadinya konflik, perang, dan perselisihan antara actor-aktor yang melewati batas-batas negara. (Subagyo. 2016: 2)

Kepentingan nasional dari setiap negara adalah hal yang sangat penting dalam hubungan internasional, dengan adanya kepentingan nasional maka setiap negara dapat membuat kebijakan luar negerinya dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Di dalam kepentingan nasional tersebut terdapat suatu kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara, kerjasama tersebut terjadi karna adanya suatu isu

internasional yang akan mempengaruhi eksistensi suatu negara tersebut serta terdapat suatu tujuan dari negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya dari negara lain. (Putera. 2017: 35)

Salah satu isu internasional yang dapat dijadikan suatu pertimbangan terhadap kebijakan luar negeri, di dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran. Dengan adanya program perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran hal ini dapat mengancam eksistensi Amerika Serikat di timur tengah, dan menggunakan senjata nuklir tersebut untuk meningkatkan kekuatan militer, keamanan suatu negara, serta kepentingan ilmu pengetahuan dan technology (IPTEK).

Pada tahun 2009 pasca terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden AS yang baru, hubungan diplomatic antara Iran dan AS menjadi semakin membaik. AS membuka diri untuk membuat pendekatan secara kebersamaan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang memicu perselisihan diantara AS – Iran. Di era kepemimpinan presiden Barack Obama AS memiliki suatu kebijakan luar negeri yang damai serta lebih memilih menggunakan kerjasama bilateral maupun multilateral dari pada *power military* atau *counter attack* terhadap negara Iran.

Kerjasama yang dilakukan oleh AS terhadap Iran dan di ikut sertakan oleh Rusia, Inggris, Perancis, China, EU, yang bertujuan untuk mengurangi atau membatasi aktivitas program nuklir Iran, perjanjian kerjasama itu adalah *Joint Compherensive Plan Of Action* JCPOA yang telah ditanda tangani di Genewa pada tahun 2013. Isi dari perjanjian itu ialah adanya pengurangan sanksi ekonomi

terhadap Iran serta adanya upaya Iran untuk mengurangi program pengembangan nuklirnya. (Andini. 2017: 232-240)

*Joint Comprehensive Plan of Action* JCPOA adalah suatu rencana gabungan yang telah diselenggarakan oleh negara-negara P5 + 1 (Amerika Serikat, United Nations, China, Iran, Prancis, dan Jerman), serta sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB 2231 ditanggal 20 juni 2015. Pada perjanjian JCPOA tersebut Iran berjanji akan memberikan data-data serta seluruh informasi yang diminta oleh *International Atomic Energy Agency* IAEA agar dapat menyelesaikan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan beberapa senjata nuklir Iran di masa lalu yang dilakukan oleh Iran. (<https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance> diakses 16 Juni 2021).

Terdapat beberapa faktor penting yang mendorong presiden Barack Obama untuk membuat perjanjian JCPOA ini. Faktor tersebut ialah faktor keamanan, dan faktor ekonomi. Faktor keamanan, dimana Amerika Serikat memiliki peran yang sangat penting terhadap keamanan di wilayah Timur Tengah. Dan adanya isu nuklir ini sangat menjadi faktor yang menyebabkan ketidak stabilan keamanan di wilayah Timur Tengah dan untuk menunjukkan integritas Amerika Serikat di wilayah ini maka Amerika Serikat ikut serta dalam upaya proses penyelesaian isu nuklir Iran tersebut dengan adanya JCPOA ini maka Iran akan lebih membuka jalur diplomasi dengan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan lainnya, misalnya konflik suriah dimana Iran juga ikut turut serta dalam konflik tersebut dan mendukung rezim Bashar Al-Assad. (Esfandiary. 2016: 232).

Faktor ekonomi yang mendorong Amerika Serikat untuk menentukan kebijakan JCPOA ini adalah sektor minyak. Amerika Serikat memberikan ancaman pada Iran dan negara mitranya juga negara-negara lain untuk menutup selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan minyak dunia. Jika Iran menutup selat tersebut maka akan dapat mengacaukan perdagangan minyak dunia karena seluruh perdagangan minyak di Timur Tengah dapat dijangkau selat tersebut. Kondisi itu tentu akan sangat menguntungkan untuk Amerika Serikat jika mau untuk berdamai dengan Iran melalui kesepakatan JCPOA ([U.S. tightens oil sanctions on Iran - Mar. 30, 2012 \(cnn.com\)](#) diakses 16 Juni 2021).

Salah satu ketentuan penting yang disepakati oleh AS-Iran dalam perjanjian JCPOA ialah bahwa Iran setuju untuk menahan diri agar tidak melanjutkan kegiatan perkembangan nuklirnya di Natanz. Dan Iran diminta untuk memberikan informasi mengenai kegiatan perkembangan nuklir Iran di Terehan, serta akses ke beberapa fasilitas terkait nuklir Iran dimana perjanjian perlindungan untuk IAEA dari Iran tidak memerlukan akses. (Kerr & Katzman. 2015: 5)

Setelah berakhirnya masa kepresidenan Barack Obama. Donald Trump secara resmi telah menjadi presiden AS menggantikan Barack Obama. Donald Trump memiliki kebijakan luarnegeri yang baru dan berbeda dengan kebijakan luar negeri yang telah dilakukan oleh Presiden Barack Obama. Selama masa kampanyenya hingga dilantiknya sebagai Presiden AS, Donald Trump terus melayangkan kritik dengan lantang terkait perjanjian ini. Pada masa kampanyenya, Donald Trump berjanji berusaha untuk menegosiasikan kembali perjanjian JCPOA

dengan tujuan menegakkan ketentuan secara ketat atau keluar dari perjanjian tersebut.

Pada tanggal 13 oktober 2017 lalu telah terjadi perdebatan antara kongres dan gedung putih yang disebabkan karna AS mendapati bahwa Iran telah melakukan suatu pelanggaran dalam perjanjian JCPOA tersebut. Tetapi hal ini dibantah oleh IAEA *The International Atomic Energy Agency* bahwa sebenarnya Iran tidak membuat suatu pelanggaran. Bahkan Iran dianggap selalu mematuhi tanggung jawabnya sebagai anggota perjanjian JCPOA serta memenuhi kewajibannya untuk patuh terhadap isi dari perjanjian JCPOA tersebut. ([Can the Iran Deal Survive a US Withdrawal? – LobeLog](#) diakses 16 Juni 2021).

Donald Trump yang tidak percaya akan hal itu justru tidak mempedulikan dan tidak memberikan kepercayaan kembali kepada Iran. Secara sepihak Donald Trump ingin mengubah point-point penting yang ada pada perjanjian JCPOA. Pada tanggal 8 mei 2018 secara mengejutkan AS menyatakan diri untuk keluar dari perjanjian JCPOA, dan Donald Trump akan memberikan sanksi kepada Iran mulai dari tanggal 7 Agustus 2018 sanksi ini sungguh sangat memberatkan Iran mulai dari dibatasinya perdagangan emas, logam mulia, alumunium, dan batu bara yang dijual oleh Iran kepada negara lain, serta sanksi berupa adanya batasan pengiriman minyak bumi ke negara lain.

Terjadinya perubahan kebijakan luar negeri AS ini disebabkan karna adanya pengaruh kuat dari sosok kepribadian Donald Trump yaitu seorang pemimpin dengan temperamen yang tinggi serta jiwa ambisius yang kuat, yang membuatnya

akan melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginannya walapun banyak orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakannya tersebut. (Ulfa. 2020: 11)

Latar belakang dari partai republik memiliki kebijakan yang terbilang cukup keras terhadap ekonomi dan politik hal ini yang juga mendasari Donald Trump selalu mengambil kebijakan yang sangat berbeda dengan Barack Obama. Selain memiliki latar belakang dari partai republik Donald Trump dikelilingi oleh teman-teman elit politiknya seperti Jhon Bolton, Mike Pompeo, Stephen miller, yang merupakan kelompok anti-Iran.

Donald Trump memiliki kekuasaan eksekutif dan memiliki wewenang untuk tidak melanjutkan 275 dari kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh Barack Obama. Sejak awal memang Trump dengan partai republiknya tidak ingin melakukan kerjasama dengan Iran terlebih lagi dengan dibuatnya perjanjian JCPOA tersebut. Trump hanya menganggap bahwa perjanjian JCPOA tersebut tidaklah efisien dalam mencegah perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran. Oleh karena itu Amerika Serikat memperhitungkan bahwa akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh Teheran sebelum point-point penting yang ada dalam perjanjian JCPOA tersebut di ubah. (<https://kumparan.com/fitri-ulfiani/keputusan-donald-trump-keluar-dari-perjanjian-nuklir-dengan-iran-1tcfD3AJkUf/full> diakses 16 Juni 2021)

Menteri Luar Negeri saat itu Rex Tillerson mengatakan bahwa adanya suatu ambisi yang dilakukan oleh Iran untuk melakukan kegiatan perkembangan nuklir dan uji coba rudal balistik merupakan suatu resiko yang sangat buruk bagi

keamanan dan perdamaian internasional. Tillerson mengatakan bahwa JCPOA akan gagal untuk menjadikan Iran sebagai negara non-nuklir, adanya JCPOA ini hanya digunakan oleh Iran untuk menunda tujuannya menjadi negara nuklir. Menteri luar negeri itu berpendapat bahwa Iran akan menciptakan senjata nuklir dimasa depan, serta perkembangan Iran atas kemampuan rudal balistik jarak jauh semakin berkembang dengan baik. Hal ini menjadi suatu pertanyaan tentang komitmen jangka panjang Iran untuk tidak melakukan perkembangan senjata nuklir sebelumnya. (Kerr & Katzman. 2018: 22-23)

Iran di tuntutan oleh Amerika Serikat untuk menyerahkan dokumen-dokumen tentang perkembangan program nuklirnya kepada IAEA, serta Iran diminta untuk menyerahkan beberapa akses situs nuklirnya kepada IAEA, dan Amerika Serikat meminta kepada Iran untuk tidak mengembangkan proses kemajuan rudal balistiknya. Amerika Serikat juga akan menuntut Iran agar mau untuk menghentikan kerjasamanya dengan kelompok teroris, seperti Houthi di Yaman dan Korps Garda Revolusi Islam. Diduga juga bahwa Iran telah menahan beberapa warga AS dan diminta untuk membebaskannya, dan AS medesak secara paksa kepada Iran untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas berbahaya yang dilakukan oleh Iran terhadap sekutu AS di Timur Tengah dan memaksa agar menarik semua pasukan Iran yang ada di Suriah. (Kerr & Katzman. 2018: 24)

Mundurannya AS dari perjanjian JCPOA tersebut dinilai telah menjadi suatu hal yang sangat tidak efisien oleh negara-negara anggota dan IAEA, mereka sedikit menyesalkan atas keputusan yang telah dilakukan oleh AS tersebut. Sebab negara-

negara anggota dan IAEA berpendapat bahwa Iran tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dibuat dalam perjanjian JCPOA tersebut. IAEA justru menganggap bahwasannya Iran selalu memberikan konfirmasi yang valid mengenai komitmennya terhadap aturan-aturan yang telah dibuat pada perjanjian JCPOA yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Iran dan telah mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian JCOA tersebut. (<https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-by-iaea-director-general-yukiya-amano-9-may-2018> diakses 16 juni 2021)

Adanya berbagai kebijakan luar negeri yang dilakukan Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir Iran tersebut, secara umum telah menggambarkan rasa tanggung jawabnya yang bertujuan untuk melindungi segenap warga dan bangsa negara Amerika Serikat, serta tanah airnya. Hal ini telah dilontarkan oleh Presiden Donald Trump pada *National Security Strategy* SSN yang manjadi pilar pertama ialah *Protect The American People, The Homeland, and The American Way of Life*. (NSS. 2017: 4).

Donald Tump menilai bahwa perjanjian JCOPA ini hanyalah suatu kesepakatan yang tidak seharusnya dilakukan. Karna didalam perjanjian ini Iran tidak dilarang untuk melakukan program rudal balistik, serta didalam perjanjian ini tidak ada larangan dan batasan bagi Iran untuk melakukan uji coba rudal. Meningkatnya ketegangan diantara AS-Iran karna kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh AS ini menimbulkan ketegangan di wilayah teluk persia karna AS mengirimkan pasukan tempurnya, dan terjadinya perang cyber diantara kedua negara tidak bisa dihentikan lagi. (Pujayanti. 2019: 9)

Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini dapat dijelaskan menggunakan Teori Offensive Realisme yang menyebutkan bahwa setiap negara akan melakukan berbagai macam cara sekali pun dengan cara-cara yang dapat mengancam keamanan negara lain, agar dapat mendapatkan kepentingan nasionalnya yang bertujuan untuk tetap bertahan hidup. Teori offensive realisme percaya bahwa dengan adanya *great power* merupakan suatu alat untuk mendapatkan tujuan nasionalnya walaupun harus dilakukan dengan cara-cara yang bersikap agresif kepada negara lainnya. (Yani & Montratama. 2017: 34) Dengan adanya suatu kebijakan yang dilakukan oleh AS yakni mengambil keputusan untuk keluar dari perjanjian JCPOA tersebut maka AS telah melakukan *foreign policynya* terhadap Iran untuk mencapai kepentingan nasionalnya walaupun harus merugikan negara Iran.

AS sebagai negara super power serta memiliki pengaruh yang cukup kuat pada perjanjian JCPOA yang bertujuan untuk membuat Iran sebagai negara non-nuklir, akan tetapi Iran secara diam-diam telah melanggar peraturan yang ada dalam JCPOA tersebut dan hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik diantara kedua negara tersebut. AS yang memiliki peran yang sangat signifikan di Timur Tengah merasa khawatir terhadap Iran jika Iran menjadi negara nuklir dan hal ini justru akan mempersempit ruang lingkup pergerakan kebijakan luar negeri AS di timur.

Dalam teori Offensive Realisme menggambarkan bahwa AS pada kasus ini harus mendapatkan suatu keuntungan individual bukan keuntungan mutlak, artinya AS harus bisa berupaya untuk berhasil mendapatkan keuntungan daripada negara

lainnya, tetapi AS tidak mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari negara lainnya maka AS tidak segan-segan untuk keluar dari perjanjian JCPOA. AS memilih keluar dari perjanjian ini karena menurut AS negara Iran dinilai tidak memenuhi syarat-syarat inti dari kesepakatan tersebut yang membuat AS merasa terancam keamanan negaranya serta mengancam keamanan internasional.

Oleh karena itu AS tidak akan lagi berpartisipasi dengan JCPOA maka secara otomatis AS akan memberlakukan kembali sanksi-sanksi yang telah ditagguhkan sesuai dengan JCPOA. Dalam pendekatan ini, tujuan utama suatu negara ialah mencapai kepentingan nasional dan mempertahankan keamanan nasionalnya. Dalam perspektif Offensive Realisme percaya bahwa dalam hubungan internasional, negara akan menjalankan *great power* terlebih dahulu untuk mencapai kepentingan nasionalnya sekalipun dengan cara-cara yang mengancam keamanan negara lain.

Terdapat konflik yang terjadi antara AS-Iran akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh AS yaitu menjatuhkan sanksi kembali terhadap Iran. Iran merespon kembali hal itu dengan mengancam armada perang AS bila AS melakukan perlawanan kepada Iran. Hal ini menimbulkan ketegangan terhadap dunia internasional bila terjadi perang terbuka antara kedua negara tersebut. Hal ini akan berpotensi menimbulkan persoalan internasional jika kedua negara memilih cara militer untuk menyelesaikan konflik ini. (Pujayanti. 2019: 8) Puncak memanasnya konflik diantara kedua negara tersebut ialah pada waktu bulan Januari tahun 2020 lalu, dimana AS telah menewaskan Mayor Jendral Qassem Soleimani beliau merupakan komandan dari pasukan Quds, sayap Garda Revolusi cabang elit pasukan militer

Iran, dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh AS dengan menggunakan serangkaian rudal yang mengenai pesawat yang telah ditumpangi oleh rombongan Mayor Jendral Qassem Soleimani dan telah menewaskan delapan orang termasuk Mayor Jendral Qassem Soleimani, yang telah terjadi di Bandara Baghdad. (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/092100165/tewasnya-jenderal-top-iran-qasem-soleimani-dalam-serangan-yang?page=all> diakses 18 Juni 2021)

Iran membalas serang yang dilakukan oleh AS dengan rudal yang ditembakkan ke tempat pasukan asal AS berada. Selain itu Iran telah melakukan serang sibernya kepada AS yang menargetkan masyarakat sipil yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat AS. Beberapa tempat yang akan menjadi target penyerangan siber Iran merupakan infrastruktur masyarakat sipil seperti rumah sakit, transportasi, dan tenaga pembangkit listrik. Menurut Keith Alexander, AS telah mempersiapkan pertahanan yang kuat dan persiapan kemampuan sibernya untuk melawan serangan siber yang dilakukan Iran kepada AS, walaupun Keith Alexander menyatakan bahwa setiap negara lebih diuntungkan pada saat menyerang menggunakan siber dari pada hanya bertahan. (<https://internasional.republika.co.id/berita/q3us6f320/antara-kekuatan-siber-amerika-dan-iran-mana-lebih-unggul> diakses 18 Juni 2021)

AS dan Iran telah melakukan cyber warfare yang mana bahwasannya perang ini diduga kuat terdapat campur tangan dari beberapa negara lain dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang juga ikut serta meramaikan perang cyber warfare antara AS-Iran ini. Menurut Pratama Persadha sebagai perktisi

keamanan siber. Ia juga memberikan bukti bahwa terdapat serangan siber yang cukup banyak sejak 6 Januari 2020, kejadian ini terjadi di negara bagian Texas.

Iran juga telah melakukan peretasan data-data milik beberapa perusahaan, dan bank AS seperti terdapat bendera Iran pada tampilan situs program website, dan terdapat gambar-gambar wajah Trump yang telah berumur darah hal ini terjadi karna dipukul oleh pengawal revolusi Iran. Perang siber juga tidak hanya terjadi dalam peretasan data-data saja, tetapi terjadi juga pada media social seperti Instagram, twitter, dan youtube. (<https://www.jpnn.com/news/waspadai-perang-siber-as-versus-iran> diakses 18 Juni 2021)

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis suatu kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada perkembangan nuklir Iran ditinjau dari perspektif realisme maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi diantaranya ialah. Pertama, skripsi dari Bella Kusuma Agustina dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul penelitian, "*Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barack Obama Terkait Program Nuklir Iran*".

Kemudian dengan tema yang sama dan judul yang hampir mirip terdapat skripsi Dewi Mahmudah Ni'matul dari jurusan Studi Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 dengan judul penelitian "*Program Nuklir Iran: Kajian Konflik Nuklir Iran Dengan Negara P5+1 (1979 – 2006)*". Dalam penelitian tersebut Bella Kusuma Agustina dan Dewi Mahmudah menganalisis program nuklir Iran.

Adanya beberapa persamaan dari penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas mengenai adanya perkembangan program nuklir Iran. sedangkan perbedaannya ialah penelitian dari Bella Kusuma Agustina dan Dewi Mahmudah mengkaji mengapa bisa terjadi konflik antara Iran dengan negara-negara Barat setelah revolusi Islam terjadi diIran. Dan penelitian tersebut membahas *kebijakan pemerintahan Barack Obama* untuk membuat perjanjian JCOPA.

Kedua, skripsi dari Denico Putra Mahardhika dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pertamina pada tahun 2020 dengan judul penelitian, *“Analisis Keputusan Amerika Serikat Untuk Keluar Dari Perjanjian Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Tahun 2018”*. Dalam penelitian ini Denico Putra Mahardhika menganalisis dan mencari tahu tentang keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari perjanjian JCPOA.

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas kebijakan Amerika Serikat dan JCPOA, dan perbedaannya ialah penelitian tersebut hanya membahas tentang kebijakan Amerika Serikat untuk keluar dari perjanjian JCPOA, sedangkan peneliti membahas tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir iran ditinjau dari kajian offensive realisme pada masa pemerintahan presiden Donald Trump.

Ketiga, skripsi dari Stefanus Wahyu Jati dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan pada tahun 2017 dengan judul penelitian, *“Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran”*. Dalam penelitian ini Stefanus Wahyu Jati

menganalisis dan mencari tahu tentang kebijakan luar negeri AS terkait pengembangan nuklir Iran dan bagaimana Iran meresponnya. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mempengaruhi program perkembangan nuklir Iran, dan perbedaannya ialah peneliti membahas tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran ditinjau dari kajian offensive realisme pada masa pemerintahan presiden Donald Trump.

Kebijakan sepihak yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, yang secara tiba-tiba mengundurkan diri dari perjanjian JCPOA telah mengujutkan para anggota JCPOA, merupakan suatu permasalahan yang cukup serius dan menyita perhatian banyak peneliti untuk mencari tahu apa alasan Amerika Serikat keluar dari perjanjian JCPOA ditinjau dari kajian offensive realisme. Tentu hal ini sangat merugikan bagi Iran karna Iran telah telah memegang komitmennya untuk patuh terhadap aturan yang ada pada perjanjian JCPOA tersebut. Negara anggota JCPOA lain pun telah menyatakan bahwa Iran patuh dan dapat mengikuti aturan yang ada. Tetapi pernyataan yang diberikan oleh negara anggota lain tersebut tidak sejalan dengan pandangan Amerika Serikat terhadap program perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran.

Setelah mundurnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA, Iran kembali dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat yaitu sanksi perbankan, ekonomi, minyak bumi dan organisasi program nuklir Iran. Hal tersebut ialah sebagai bukti bahwa Amerika Serikat pasca keluar dari perjanjian JCPOA masih memberikan sanksi-sanksi terhadap Iran. Hal ini sangat menarik untuk diteliti menggunakan kajian

offensive realisme yang mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut berubah dengan cepat dan signifikan terhadap program nuklir Iran.

Offensive Realisme memandang bahwa dunia ini merupakan tempat yang anarki dimana masing-masing negaranya ialah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kebebasan untuk mendapatkan kepentingannya sekalipun dengan cara-cara yang dapat mengancam eksistensi dan keamanan actor lainnya. Jika mengacu pada penjelasan Offensive Realisme tersebut maka Amerika Serikat takut jika Iran berhasil mengembangkan nuklirnya hal ini akan mengancam eksistensi Amerika Serikat ditimur tengah dan keamanan nasionalnya. Maka Amerika Serikat tidak henti-hentinya mengeluarkan kebijakan yang otoriter terhadap Iran. Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul:

**“KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP  
NUKLIR IRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF REALISME 2016-2020”**

Terdapat beberapa ketertarikan peneliti dalam meneliti masalah ini yakni karna terdapat beberapa mata kuliah yaitu seperti Analisa Politik Luar Negeri, Teori Hubungan Internasional, Studi Keamanan, dan HI di Amerika Utara diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Politik Luar Negeri

Mata kuliah yang mempelajari tentang analisis politik luar negeri suatu negara yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kepentingan nasionalnya. Adanya kaitan mata kuliah ini dengan penelitian ini ialah peneliti menganalisis

kepentingan nasional, landasan dan asas-asas yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam menentukan arah politik luar negerinya terhadap program perkembangan nuklir Iran.

## 2. Teori Hubungan Internasional

Dalam mata kuliah ini peneliti mempelajari mengenai cara-cara dan strategi yang akan dilakukan oleh suatu negara dalam menyelesaikan permasalahannya dengan negara lain, serta adanya suatu upaya untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan negara lain agar dapat mendapatkan kepentingan nasionalnya.

## 3. Studi Keamanan Internasional

Pada mata kuliah ini peneliti dapat mengetahui tentang adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi mengenai keamanan internasional serta perkembangan senjata militer yang telah menjadi kekuatan penting dalam suatu keamanan negara. Adanya berbagai senjata militer memiliki fungsi dan kedudukannya masing-masing dalam keamanan internasional. Salah satunya ialah senjata nuklir yang menjadi senjata pemusnah masalah yang dapat digunakan sebagai alat untuk berdiplomasi dengan negara lain dalam hubungan internasional. Dengan adanya mata kuliah ini peneliti dapat mengetahui seberapa pentingnya peran dari senjata nuklir dalam politik global dan keamanan internasional.

## 4. HI di Amerika Utara

Pada mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari tentang berbagai kepentingan dan kebijakan - kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap benua-benua di Amerika Utara serta peneliti menjadi tahu bahwa

Amerika Serikat menjadi suatu negara yang memiliki power yang sangat kuat dan berpengaruh serta menjadi pedoman bagi negara-negara lain di benua Amerika Utara.

Kebijakan Amerika Serikat tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam kajian hubungan internasional di Amerika Utara serta menjadi acuan untuk negara-negara lain agar dapat mempelajari kebijakan luar negeri negara super power tersebut di benua Amerika Utara dan dalam dunia internasional.

Adanya kaitan mata kuliah ini dengan penelitian ini ialah peneliti menganalisis bahwa penting untuk mengetahui seberapa pentingnya strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara-negara benua Amerika Utara yang mungkin ini dapat menjadi suatu acuan atau pemicu terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat kepada perkembangan program nuklir Iran.

### **1.3 Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Rumusan Masalah Mayor**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat untuk memudahkan dalam penelitian dan menganalisis suatu permasalahan, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: ***“Bagaimanakah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir Iran pada masa Presiden Donald Trump tahun 2016-2020?”***

### **1.3.2 Rumusan Masalah Minor**

Adapun rumusan masalah minor yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan AS merubah kebijakan luar negerinya dan keluar dari perjanjian JCPOA?
2. Apa keuntungan yang didapatkan oleh AS setelah keluar dari perjanjian JCPOA?
3. Apakah dampak buruk yang didapatkan Iran pasca mundurnya AS dari perjanjian JCPOA?

### **1.3.3 Pembatasan Masalah**

Peneliti mengambil rentang waktu pada tahun 2016-2020 terkait dengan beberapa alasan. Karna sepanjang tahun 2016 merupakan awal dari kampanyenya Donald Trump sebagai seorang kritikus vocal dari perjanjian JCPOA tersebut. Donald Trump berjanji akan berusaha untuk menegakkan persyaratannya secara tegas kepada Iran, atau akan membatalkan kesepakatan tersebut.

Setelah Donald Trump mulai menjabat sebagai Presiden, pada tanggal 10 Februari 2017 diadakan pertemuan dengan administrasi yang berfokus pada JCPOA, Frederica Mogherini adalah sebagai perwakilan Tinggi Uni Eropa telah menyatakan bahwa pejabat administrasi meyakinkan kepadanya bahwa administrasi bermaksud untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian JCPOA.

Akan tetapi pada awal 2018 AS menyatakan permusahannya terhadap JCPOA, adanya ambisi nuklir Iran adalah suatu resiko besar bagi perdamaian dan keamanan internasional dan JCPOA hanya menunda tujuan Iran menjadi negara nuklir. AS melihat bahwa adanya suatu pengembangan kemampuan rudal balistik jarak jauh Iran yang semakin meningkat, dan strategi kegiatan agresifnya untuk menggoyahkan pemerintah-pemerintah tetangga, serta menimbulkan pertanyaan tentang komitmen jangka panjangnya untuk melepaskan kemampuan senjata nuklir.

Hal tersebut membuat Amerika Serikat menjadi tidak percaya dan tidak ingin melakukan hubungan kerjasama dengan Iran. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat memilih untuk keluar dari perjanjian (JCPOA) pada tanggal 8 Mei 2018.

Rentang waktu penelitian berakhir pada tahun 2020 agar masalah dan kejadian yang peneliti ambil bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bersifat offensive realisme terhadap perjanjian JCPOA dan Iran tidak terlalu singkat.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam dan rinci tentang **“Bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap perkembangan Nuklir Iran dalam kajian offensive realisme pada tahun 2016-2020”**.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan AS merubah kebijakan luar negerinya keluar dari kesepakatan nuklir JCPO?
2. Untuk menganalisis keuntungan apa yang didapatkan oleh AS setelah mundur dari perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action*.
3. Apakah dampak buruk yang didapatkan Iran pasca mundurnya AS dari perjanjian JCPOA

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Dari aspek teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para mahasiswa ilmu hubungan internasional, seperti:

1. Memberikan gambaran mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran ditinjau dari kajian offensive realisme.
2. Memberikan gambaran mengenai respon Iran pasca mundurnya AS dari perjanjian JCPOA

#### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Skripsi ini diharapkan bisa menambah sumber informasi yang dibutuhkan oleh para mahasiswa ilmu hubungan internasional, adapun kegunaannya diantara lain ialah:

1. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca terutama para penstudi ilmu hubungan internasional untuk mengetahui fenomena dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Iran serta gambaran mengenai perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* JCPOA yang merupakan suatu penghubung antara kepentingan Amerika Serikat dan Iran serta negara lainnya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran menggunakan perspektif dalam hubungan internasional, serta dapat meneliti berbagai masalah dalam hubungan internasional menggunakan perspektif realisme.